

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh DPMPTSP Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja DPMPTSP dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan VISI, MISI, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dengan perencanaan program Kerja Tahunan Kota Bekasi dalam satu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa member ikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

Bekasi, 2 Agustus 2024


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**

DICKY IRAWAN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720413 199901 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran Tabel	iii
Lampiran Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KOTA BEKASI	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	43
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi ...	53
2.4 Review terhadap rancangan RKPD	56
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	81
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	82
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83
3.3 Program dan Kegiatan	85
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BEKASI	105
BAB V. PENUTUP	114

Daftar Tabel :

2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	11
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	18
2.3	Analisis pencapaian indikator kinerja utama nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2023	44
2.4	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Pada DPMPTSP Tahun 2023	45
2.5	Analisis capaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	46
2.6	Analisis Pencapaian indikator kinerja utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2023	48
2.7	Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	51
2.8	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019-2023	52
2.9	Review terhadap rancangan awal RKPD 2025	57
2.10	Sandingan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	80
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi ...	85
3.2	Program Nasional, program Kota dan Kegiatan	89
3.3	Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 (rancangan awal) DPMPTSP Kota Bekasi	91
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif	106

Daftar Gambar :

1	Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD (Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	2
---	---	---

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi adalah dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun.

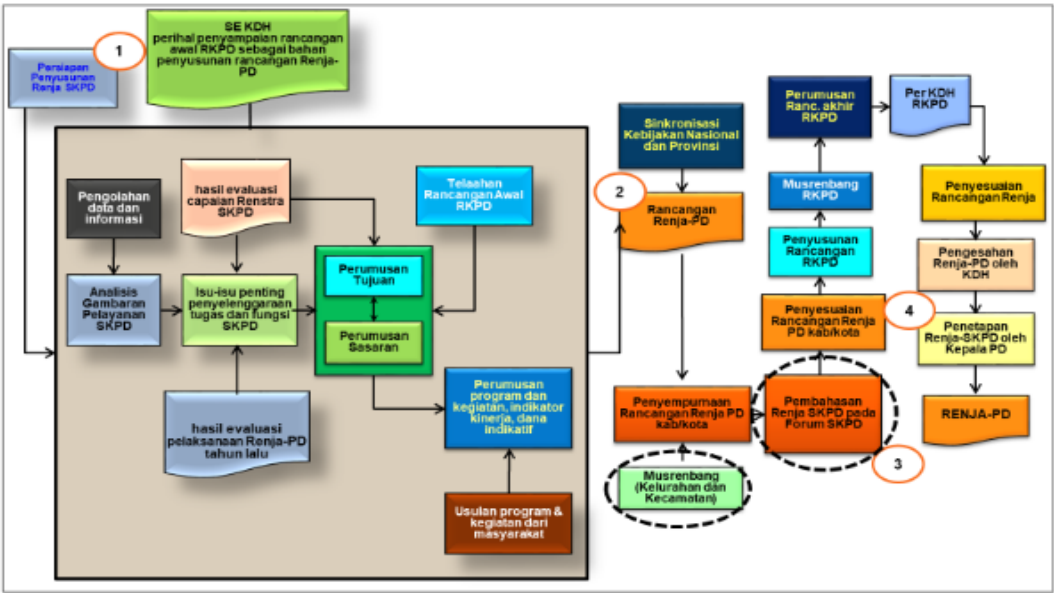
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Dokumen Renja DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Bekasi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan renja.

Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) yang selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Bekasi. Selain itu, dalam penyusunan rancangan akhir Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 juga mengacu kepada Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
 16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
 17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
 18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);

19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Bekasi (Berita Daerah nomor 12 Kota Bekasi Tahun 2024);
24. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
25. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 068.2/Kep.71/DPMPTSP.Set/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor :068.2/Kep.719 DPMPTSP/VII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
26. Surat Edaran Nomor 000.7/8915/Bappelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran

2025 dalam urusan penanaman modal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari rancangan akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025 dalam mewujudkan arah capaian kinerja berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Tahapan APBD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku;
2. Menyusun rencana strategi pencapaian indikator kinerja pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan Tahunan Daerah;
3. Mengevaluasi Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan;
4. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025;
5. Tersedianya acuan untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja pada DPMPTSP Tahun 2025;
6. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan Rancangan akhir rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan

antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN DPMPTSP KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

Menjelaskan perumusan kegiatan prioritas tahun 2025, dan rencana pendanaan berdasarkan pagu indikatif.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B A B II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bekasi

Rancangan Akhir (Ranhir) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen rancangan akhir, tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja tahun berjalan. Kepala DPMPTSP Kota Bekasi menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappelitbangda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala DPMPTSP Kota Bekasi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki Tahun kedua pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Tahun kelima pada renstra Tahun 2018-2023. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja DPMPTSP Kota Bekasi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah”. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam tiga sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Ketiga sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan dilaksanakan dalam 24 (dua puluh empat) sub kegiatan pada Tahun 2023. Pencapaian kinerja Tahun 2023 dalam mencapai sasaran secara lebih lengkap disajikan dalam Table 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	83.85	84,57	100,85
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	83,10	85,31	102,66
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	4%	-7,17%	-179,25

Sumber data: Bagian Penataan Kelola Penanaman Modal, Penata Perizinan dan bagian Analisis keuangan pusat dan Daerah.

Dari tabel capaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP” ditetapkan target Nilai (LHE) AKIP yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 83,85 dengan nilai realisasi sebesar 84,57 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,85%;
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target indeks Tahun 2023 sebesar 83,10 dengan realisasi sebesar 85,31 dimana capaian kinerjanya mencapai 102,66%.
3. Sasaran strategis lainnya yaitu “Peningkatan Nilai Investasi Daerah” dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 4% dengan realisasi sebesar -7,17% sehingga capaian kinerjanya bernilai negatif sebesar -179,25%.

Dua sasaran strategis di atas berkinerja cukup bagus sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan sasaran strategis dalam rangka Peningkatan Nilai Investasi Daerah tahun 2023 ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target peningkatan nilai investasi daerah yaitu kendala internal dan eksternal DPMPTSP Kota Bekasi. Kendala internal diantaranya yaitu :

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;

Sedangkan kendala eksternal diantaranya yaitu :

1. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
2. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
4. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun analisis capaian dari masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

Ada 10 (sepuluh) Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2023 Yang Mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Pada DPMPTSP yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 19 (sembilan belas) sub Kegiatan pada masing-masing indikator program telah tercapai pada Tahun 2023. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 4 Indikator yaitu

1. **Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
2. **Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;**
3. **Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**
4. **Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Penjelasan capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dokumen yang terealisasi sampai dengan triwulan IV antara lain :
 - Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 1, 2, 3, dan 4;
 - Dokumen Renja Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2024;
 - Dokumen Revisi Renstra DPMPTSP 2018-2023;
 - Dokumen SAKIP;
 - Dok Renstra 2024-2026;
 - Dokumen ZI WBK;
 - Dokumen Reformasi Birokrasi;

- Dokumen LKIP dan;
- Evaluasi kinerja triwulan IV
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik 100%;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik 100%.
- 2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik sebesar 100%;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan alokasi anggaran s.d. Triwulan IV. Untuk dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sudah tersusun dengan realisasi fisik 100%.
- 3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis sebanyak 3 (tiga) orang dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 2. Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 3. Penyediaan cetakan dan penggandaan realisasi fisik sebesar 100%;
 4. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik sebesar 100%;
 5. Fasilitas Kunjungan Tamu realisasi Fisik 100%;
 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik sebesar 100%;
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi fisik sebesar 100%.
 - b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi fisik sebesar 100%;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik sebesar 100%;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik sebesar 90%;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi fisik sebesar 100%.

B. Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdapat 2 (dua) indikator pada Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu :

1. Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik;

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 1 (satu) sub Kegiatan yaitu : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari indikator program Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik dengan realisasi fisik 100%.

Dari indikator Program tersebut yaitu Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada MPP dan GPP target tahun 2023 sebanyak 113 jenis layanan dari 132 jenis layanan yang tersedia. Realisasi s.d. akhir tahun 2023 mencapai 164 jenis layanan dengan tingkat capaian target sebesar 145%. Capaian target sebesar 145% tersebut dikarenakan adanya penambahan layanan pada 1 Gerai di Mall Pelayanan Publik (MPP) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara DPMPTSP Kota Bekasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bekasi dengan nomor 067/04-KS/DPMPTSP-Datekindu/II/2023 dan nomor PM.06.05/123/Disdukcapil/2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Kabupaten Bekasi Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi yaitu 9 layanan yang terdiri dari Biodata penduduk, Pencetakan kartu keluarga, Perekaman KTP Elektronik, Pencetakan KTP Elektronik, Pencetakan Kartu Identitas Anak, Pelayanan Pindah Datang, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian.

2. Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik.

Pada indikator kedua untuk program Pelayanan Penanaman Modal sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal tidak dialokasikan anggaran Tahun 2023 namun pencapaian kinerja tersebut terealisasi fisik sebesar 100%.

Indikator Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik telah dilaksanakan Realisasi di ambil dari jumlah izin terbit sebanyak 68.317 izin dengan jumlah total pemohon sebanyak 42.640. Hal tersebut tercapai dengan melakukan evaluasi sistem, SOP, sarana dan prasarana pendukung pelayanan pengaduan, evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan telah dilaksanakan, dengan hasil evaluasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pegawai Front Office terbaik setiap bulannya, Evaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

C. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

program ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi.**

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 1 (satu) sub Kegiatan yaitu : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari indikator program Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dengan realisasi fisik 100%

Pada indikator sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan terealisasi 12 (duabelas) Dokumen yang sudah dilaksanakan laporan perizinan dan non perizinan dengan ketercapaian setiap bulan 1 dokumen (100%) dari target 12 dokumen dalam 1 Tahun.

Tindaklanjut pada triwulan IV untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Konsisten dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Mempersiapkan schedule pelaksanaan pekerjaan;
3. Melaksanakan monitoring pekerjaan;
4. Penerapan manajemen mutu, melakukan analisa resiko dan peluang;
5. Maintenance/pengelolaan sistem aplikasi.

D. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM.**

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 1 (satu) sub Kegiatan yaitu : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dari indikator program Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM dengan realisasi fisik 90%.

Indikator Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM pada program ini diperoleh dari realisasi jumlah investasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.378.837.008.972,- dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 13.868.153.684.143,-. Perbandingan antara angka target dengan angka realisasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi yang ditetapkan sebesar 4% dari nilai investasi tahun sebelumnya tidak tercapai, persentase nilai investasi Kota Bekasi Tahun 2023 yaitu sebesar -7,17% dari target dengan capaian kinerja sebesar -179,25%.

E. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP.**

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 1 (satu) sub Kegiatan yaitu: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dari indikator program Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM dengan realisasi fisik 100%.

Indikator Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kota Bekasi dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota.

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dengan menggunakan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dari Kementerian Investasi/ BKPM RI serta Peraturan Kepala BKPM Pusat Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai petunjuk teknisnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai dasar kewenangan DPMPTSP Kota Bekasi untuk menyelenggarakan, melaksanakan, membina, mengawasi, dan memberikan sanksi administratif pada perizinan berusaha berbasis resiko di Kota Bekasi, serta Keputusan Wali Kota

Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor :060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Capaian tersebut di atas sebagai dasar pengambilan data untuk Indikator jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP, dengan realisasi sebanyak 68.317 izin dengan total izin yang terdiri dari :

- a. izin terbit melalui OSS sebanyak 32.065 izin;
- b. izin terbit melalui aplikasi SILAT sebanyak 36.252 izin.

F. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program tersebut memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM.**

Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dari indikator program Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dengan realisasi fisik 100%.

Capaian kinerja diatas selaras dengan realisasi indikator program dengan jumlah perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM sebanyak 12.389 Perusahaan atau sebesar 287% dari total jumlah perusahaan wajib LKPM (4.310). Target jumlah perusahaan yang patuh menyampaikan LKPM Tahun 2023 yaitu sebesar 28% atau sebanyak 1.207 perusahaan, sehingga capaian kinerja Tahun 2023 mencapai 1.026,6%.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2024 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s.d Triwulan II

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1					Urusan Wajib									
1	20				Bidang Urusan wajib otonomi daerah,pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan Persandian									
					Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kota Bekasi	83,80	84,6	83,85	84,57	100,85	A	A (84,97)	100%
					Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	83	89,82	83,10	85,31	102,66	86	87,20	101%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	83,15%	83,15%	100%	52,91%	52,91%
					Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	88%	88%	100%	26,55%	26,55%
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	100%	-	-
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	99,93%	100%	96,75%	96,75%	100%	22,43%	22,43%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	60%	60%
2	12	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja DPMPPTSP, LKIP 2021, Renja 2021, Review Renstra DPMPPTSP 2018-2023, SAKIP 2021 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Dokumen	11 dokumen	- 12 Laporan	- 10 Laporan	- 83%	- 5 laporan	- 3 Laporan	- 3 Laporan

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	8,67%	100%	100%	100%	100%	26,55%	26,55%
2	12	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	-	-	100%	-	100%	-	-	-
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1846 Orang/ Bulan	320 Orang Orang/bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	1.792 orang/bulan	1.792 Orang/ Bulan	100%	1.708 orang/bulan	907 orang/bulan	53,10%
2	12	01	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen (14 Laporan)	100%	1 laporan	100%	-	-	-
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	-	-	-	-	-	4 laporan	2 laporan	50%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0 %	0 %
2	12	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	253 Unit	253 Unit	-	-	-	-	-	-
2	12	05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	2 orang	3 orang	3 orang	100%	15 orang	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96,31%	100%	100%	100%	100%	35,71%	35,71%
2	12	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	233 Unit	233 unit	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 paket	100%	1 paket	-	-
2	12	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	15.633 Unit	15.568 Unit	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	9.529 Unit	9.526 Unit	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah penggandaan	133.619 Lembar	133.619 Lembar	-	-	-	-	-			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	-	-	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-		
2	12	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-undangan	Jumlah bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan	2.160 Eksemplar/ Buku	2.160 Eksemplar/ Buku	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12 Laporan	12 Dokumen	100%	12 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
2	12	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas	40 Kali	40 Kali	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	24 laporan	24 laporan	100%	12 laporan	9 Laporan	9 Laporan
2	12	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata/dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen	682 Dokumen	682 Dokumen	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	600 Dokumen	600 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								LEMBAR :		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	-	-	-	100%	23,53%	23,53%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	55 Unit	55 Unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	-
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	17 unit	8 unit	8 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	46 Unit	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	20,83%	20,83%
2	12	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet	36 rekening/bulan	36 rekening/bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50 %
2	12	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Luas bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	-	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	41,66 %
2	12	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,49 %	30,49 %
2	12	09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit -	7 Unit -	- 7 Unit	- 7 unit	- 100%	- 7 Unit	- 3 Unit	- 42,86%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	3 Unit	42,86%	
2	12	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	100 Unit	100 Unit	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	108 Unit	108 Unit	100%	80 Unit	29 Unit	36,25%	
2	12	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	-	-	1 unit	-	-	
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	4% Rp. 8.493.779.874.393,84,-	63,27% Rp. 13.334.763.157.830	4% Rp. 13.868.153.684.143	-7,17% 12.378.837.008.972,-	-179,25%	-	-	-	
					Persentase peningkatan investor baru	-	-	-	-	-	4%	125%	3.116%	
2	18	2	01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan LKPM	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
					Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal	-	-	-	-	-	100%	-	-	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	2	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Profil Pemantauan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Profil Pengawasan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Instruksi Wali Kota Tentang Fasilitas Pelayanan Perizinan Khusus untuk UMKM/IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen -	- -	1 dokumen -	1 dokumen -	100% -	- -	- -	- -
2	18	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha	100%	100%	-	-	-	-	-	-
2	18	02	2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Terupgrade	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-
2	18	3		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP	12.103 izin	33.701 izin	5.113 izin	68.317 izin	1.336,1%	-	-	-
					Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi	-	-	-	-	-	12.000 jumlah	77,38%	77,38%
2	18	3	2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan nilai investasi	100%	33.701 izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	3	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event	1 Event Promosi	1 Event Promosi	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik	110	155	113	164	145%	-	-	-	-
					Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik	100%	144%	100%	160,21%	160,21%	-	-	-	-
					Persentase penerbitan Perizinan dan non perizinan Sesuai SOP	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	4	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
					Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP	-	-	-	-	100%	71,40%	71,40%		
2	18	4	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Jenis layanan MPP/GPP	110 layanan	155 layanan	113 Layanan	164 layanan	145%	-	-	-	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 Pelaku usaha	10.000 Pelaku usaha	10.000 Pelaku usaha	10.000 Pelaku Usaha	100%	-	-	-	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	11.000 pelaku usaha	11.000 pelaku usaha	100 %
2	18	4	2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaan Modal	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	100%	-	-	-	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	-	-	-	-	-	500 Kegiatan Usaha	214 Kegiatan Usaha	42,80 %
2	18	5		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	26%	96,96%	28%	287%	1.026,6%	16%	43,33%	270%
2	18	5	2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	26%	96,96%	28%	287%	1.026,6%	16%	43,33%	270%

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	5	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	528 pelaku usaha	528 pelaku usaha	692 Pelaku Usaha	692 Pelaku Usaha	100%	-	-	-
					Jumlah berita acara hasil pengawasan	150 berita acara	150 berita acara	-	-	-	-	-	-
2	18	5	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN yang diawasi, di monitor dan di evaluasi	6 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-
					Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan simkronisasi pengawasan	-	-	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100%	-	-	-
					Jumlah kendaraan operasional pelayanan publik	-	-	1 unit	(dikarenakan berdasarkan amanat pasal 10 peraturan menteri keuangan no.67 tahun 2023 dan surat	-	-	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
										pemberitahuan no.900/7616/bapp elitbangda.AP\$E P tentang penyerapan dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan baik anggaran maupun output kegiatan).				
2	18	5	4	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	-	-	-	-	-	10 kegiatan usaha	-	-

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										LEMBAR :				
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	5	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	-	-	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	100 %	
2	18	5	6	Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaanperizinan berusaha	-	-	-	-	-	519 kegiatan usaha	352 Kegiatan Usaha	67,82 %	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											LEMBAR :		
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	6		Program Pengelolaan Data Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi	100%	78,60%	100%	100%	100%	-	-	-
					Jumlah system informasi penanaman modal yang dikelola	-	-	-	-	-	4 Jumlah sistem yang dipelihara	4 Jumlah sistem yang dipelihara	4 Jumlah sistem yang dipelihara
2	18	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Pelayanan Perizinan Online yang dikelola	100%	78,60%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	18	2	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan Online	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Aplikasi Dikelola	3 Aplikasi	3 Aplikasi	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IT	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Sertifikat ISO 9001:2015	1 setifikat ISO 9001:2015	1 setifikat ISO 9001:2015	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								LEMBAR :		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN (n-3) 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (n-1) 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN(n-2) 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n-1) 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					100%			50 %
		Jumlah Website Investasi	-	-	1 aplikasi	(dikarenakan berdasarkan amanat pasal 10 peraturan menteri keuangan no.67 tahun 2023 dan surat pemberitahuan no.900/7616/bapp elitbangda.APSE P tentang penyerapan dana insentif fiskal pada kegiatan ini tidak diperkenankan baik anggaran maupun output kegiatan).	-	-	-	-
		Jumlah sarana prasarana	-	-	25 unit		-	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi website investasi	-	-	54 orang		-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, DPMPTSP Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut. Terdapat tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi, dimana tujuannya tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat;
3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

dengan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Indikator yang menjadi patokan peningkatannya dapat dilihat melalui Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi dengan indikator peningkatan persentase pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Kota Bekasi.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajibannya

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja mencapai peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2023. Indikator yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah yang merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP
TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2023			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	6	7	8
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	83,85	84,57	100,85%

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023, Diolah.

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2023 sebesar 83,85 sementara realisasi mencapai 84,57 maka capaian kinerja tahun 2023 atas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP sebesar 100,85%, maka capaian Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP pada tahun 2023 telah terlampaui.

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.4
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DPMPTSP KOTA BEKASI KOTA BEKASI
TAHUN 2023

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	2	3	5
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,00
B	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,56
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,82
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00	20,19
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023.

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara kualitas DPMPTSP Kota Bekasi di tahun 2022 ini dapat memperoleh capaian Nilai (LHE) AKIP sebesar 84,60 dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja **A**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut di butuhkan data dukungan dari capaian kinerja tujuan/sasaran ke dua (2) yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Target IKM DPMPTSP Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 83,10 indeks, sementara realisasi mencapai 85,31 indeks, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 102,65%, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pencapaian yang melampaui target. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKM
TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2023			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,10	85,31	102,66%

Sumber data : Laporan Tahunan DPMPTSP Tahun 2023

Nilai IKM unit Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi sebesar **85,31** menempatkan DPMPTSP Kota Bekasi atas Mutu Pelayanan pada kategori **B (BAIK)**.

Pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2023 ini melebihi target (102,66%), hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya penyebab internal dan eksternal yang mampu mengungkit pencapaian kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersosialisasikannya kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai pelayanan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Bekasi melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak dan website serta media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook.

2. Telah terstandarisasinya pelayanan perizinan pada DPMPTSP melalui beberapa Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Standard Operasional Prosedur pelayanan perizinan;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat pemohon izin;
4. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan perizinan kepada;
5. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi dan inovasi secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
 - Simplikasi perizinan;
 - Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
 - Pelayanan perizinan berbasis online serta aplikasi *tracker* (pelacakan/pegecekan progress);
 - Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online;
 - Penggunaan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dari perangkat daerah teknis dalam bekerjasama terkait proses penerbitan perizinan;
2. Adanya dukungan dari APBN berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota.

Adapun langkah-langkah yang akan terus dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi;

2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui inovasi pengintegrasian sistem pelayanan yang ada dengan instansi lainnya yang belum bekerja sama dengan DPMPTSP Kota Bekasi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Pajak, dan Konsil Kedokteran Indonesia (KIK). Strategi lainnya adalah melalui peningkatan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan dan sekaligus membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023 terkait dengan nilai realisasi investasi mengacu pada Tujuan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah, serta Sasaran Peningkatan Nilai Investasi Daerah dimana indikator tujuan/sasarannya adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional, dimana Target Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2023 sebesar 4% dengan realisasi sebesar -7,17% sehingga capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar -179,25%.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa target sasaran strategis peningkatan nilai investasi daerah yang telah ditetapkan tidak tercapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.6
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENINGKATAN NILAI INVESTASI DAERAH
TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	%	4%	-7,17% (Rp.12.378.837.008.972)	-179,25%

Sumber data: Laporan investasi dari bidang Penanaman Modal Dinas PMPTSP

Kegagalan pencapaian target peningkatan nilai investasi daerah tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kota Bekasi;
3. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
4. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu;
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
6. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah.

Untuk meningkatkan kinerja capaian atas indikator peningkatan nilai investasi daerah sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan dibutuhkan strategi yang tepat dari Pemerintah Kota Bekasi agar mampu menarik minat calon investor untuk berinvestasi melalui kebijakan kemudahan berinvestasi di wilayah Kota Bekasi salah satunya yaitu dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kemudahan berinvestasi di Kota Bekasi dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor, meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi dan menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMDN/PMA.

Dalam usaha pencapaian target kinerja tahun 2023, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. Menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke – XVI Tahun 2023 dan Giat Makasar Investment Forum pada tanggal 11 Juli sampai dengan 14 Juli 2023 di Makassar;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi (TP3) yang membidangi penanaman modal/ investasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Melaksanakan koordinasi dengan KADIN Kota Bekasi terkait persiapan pelaksanaan Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke – 2;

5. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi terkait data UMKM binaan sebagai peserta kemitraan dengan Pelaku Usaha;
6. Koordinasi dengan Pelaku Usaha terkait perjanjian kerjasama/kemitraan dengan UMKM binaan Pemerintah Kota Bekasi;
7. Melaksanakan giat Talk Show Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke – 2 pada tanggal 2 Agustus 2023 bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi;
8. Mengadiri kegiatan IKM Hunter Goes to Bekasi yang diselenggarakan oleh KADIN Kota Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Aula Garuda BBPVP Menaker, Kayuringin Kota Bekasi;
9. Mengikuti kurasi UMKM yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2023 bertempat di LSPR Kota Bekasi guna mendukung seleksi produk UMKM unggulan untuk GO Eksport, Go Retail, dan Go Internasional.
10. Membuat Nota Kesepakatan Kerja Sama antara DPMPTSP Kota Bekasi, KADIN Kota Bekasi dan Pelaku Usaha;
11. Melaksanakan kegiatan Bekasi Investment Gathering (BIG) Tahun 2023 dengan tema “Mengusung Jejaring dan Kemitraan untuk Investasi Tumbuh di Kota Bekasi” pada tanggal 7 September 2023 di XXI Lounge Mega Mall Bekasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. capaian realisasi atas target sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada rincian tabel 2.7 dan 2.8 berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi
Tahun 2019 s.d Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN					PROYEKSI TINGKAT CAPAIAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
Misi Kesatu : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Indeks	-	-	83.75	83,85	83,85	-	83,63	84.47	84,60	84,57	84,57	-	-	100.85	101%	100,85%	100,85%
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10	82,75	82,80	84.11	89,82	85,31	85,31	100,06%	100%	101,45%	108,21%	102,66%	102,66%
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Peningkatan daya saing investasi daerah	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen (%)	10%	10%	4%	4%	4%	-25,22%	-14,83%	22,6% Rp.8.167.096.033.071	63,27% Rp.13.334.763.157.830	-7,17 (Rp.12.378.837.008.972)	-7,17 (Rp.12.378.837.008.972)	252,19%	148,3%	565%	1.582%	-179,25%	-179,25%

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2019 (THN N-2)	TAHUN 2020 (TNN N-1)	TAHUN 2021 (THN N)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	TAHUN 2019 (THNN-2)	TAHUN 2020 (THN N-1)	TAHUN 2021 (THN N)	TAHUN 2022 (THN N+1)	TAHUN 2023 (THN N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30- 50), D(0-30)	-	-	83.75	83.80	83.85	-	83,63	84,47	84,60	84,57	100,85%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	Rumus : NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) Rumus : IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang _____ Total Unsur yang Terisi IKM = Jumlah NRR Tertimbang X 25	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10	82,75	82,80	84,11	89,82	85,31	102,66%
3.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	Rumus : Nilai Investasi (Tahun N) – Nilai Investasi (Tahun N-1) _____ X Nilai Investasi N-1	10% (Rp.11.506.05 8.855.280)	10% (Rp.12.656.66 4.740.808,00)	4%	4%	4%	-25,22% (Rp7.822.147. 070.999)	-14,83% (Rp6.661.394 .899.708)	22,6% Rp.8.167.0 96.033.071	63,27 Rp. 13.334.76 3.157.830	-7,17% (Rp.12.378. 837.008.97 2).	-179,25%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Bekasi.

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi untuk mendorong perekonomian masyarakat Kota Bekasi khususnya dan pada tingkat nasional umumnya. Pemerintah pusat mengidentifikasi bahwa rendahnya nilai investasi di Indonesia sebagai akibat dari berbelitnya prosedur perizinan di berbagai sektor sehingga dipandang perlu adanya perbaikan aturan-aturan untuk menghapus kerumitan pelayanan perizinan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akhirnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Disahkan Menjadi Undang-Undang, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan iklim kemudahan dalam berinvestasi

Turunan dari undang-undang tersebut berupa 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden dimana 2 peraturan pemerintah telah dimandatkan pada Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua PP tersebut memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Peralihan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyusunan Perda/Perkada tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berdiri sendiri dan non tipologi, Penyusunan Perda/Perkada tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Perkada pendelegasian kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penetapan dan pelantikan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui penerapan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Assessment (OSS RBA). Penerapan sistem OSS RBA diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia dengan membagi perizinan sesuai dengan tingkat risiko dari pelaku usaha.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang dikemukakan oleh Kementerian Investasi/ BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Adapun isu strategis Kementerian Investasi/ BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi/ BKPM dalam rencana aksinya antara lain :

- ❖ Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- ❖ Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- ❖ Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- ❖ Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya DPMPTSP Kota Bekasi terus melaksanakan dan menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjaring dan meningkatkan minat investasi sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai dan terealisasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan proses perizinan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan 2026 untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan DPMPTSP yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, kebijakan tersebut diantaranya :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Barat;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Membentuk Tim internal DPMPTSP dan Tim tingkat Kota dengan melibatkan Dinas Teknis;
7. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan promosi penanaman modal;
9. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
10. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
11. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi “ramah investasi”;
12. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
13. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
14. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;
15. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);
16. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
17. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
18. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
19. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
20. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
21. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;

- 22. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
- 23. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
- 24. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Mengacu kepada RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang ada, hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2025, selain memperhatikan RPD 2024-2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Pra Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom-up). Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjangingan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD yang di tuangkan ke dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	30.052.061.020	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.463.540.340	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	165.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	15.071.309.000		Kota Bekasi	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	15.424.378.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.071.309.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.424.378.000	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1846 Orang /Bulan	15.056.309.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.208 Orang /Bulan	15.409.378.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	450.000.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	328.750.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	450.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	328.750.000	
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	400.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	1 paket	278.750.000	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.570.000.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.241.593.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.570.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.241.593.000	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	21.533.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	200.000.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	265.447.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	265.447.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	20 Unit	265.447.000	
		Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.895.752.020		Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.958.955.580	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.895.752.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.958.955.580	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	747.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	736.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.148.752.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.222.955.580	
		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	850.000.000		Kota Bekasi	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	641.660.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	641.660.000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	
21.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	250.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	255.000.000	
8.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	150.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	55.000.000	
22.	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.000.000	
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	100.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah provinsi	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
25.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	-	-	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	13.000 Pelaku Usaha	450.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	450.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	
26.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	450.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	6.191.950.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	5.451.684.000	
11.	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.191.950.000	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.451.684.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	365.000.000	
28.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pela	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risikoTerintegrasi Secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	5.891.950.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risikoTerintegrasi Secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	300.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15%	475.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15%	475.000.000	
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	475.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	475.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31.	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	275.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	275.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI.	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	4	700.000.000	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	4	525.319.070	
13.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	700.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	700.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	
			BLPU		30.052.061.020			BLPU		28.463.540.340	
			BLU		8.066.950.000			BLU		7.057.003.070	
			Total Anggaran		38.119.011.020			Total Anggaran		35.520.543.410	

Untuk Target pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024-2026 terdapat beberapa perbedaan dan sudah dilakukan dengan metode sandingan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Renstra Tahun 2024-2026 beserta alasannya, data tersebut dapat dilihat di Tabel 2.10 sebagai berikut :

TABEL 2.10
SANDINGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

KODE			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RPD					RENSTRA				
					Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	10,5%	16%	21%	26%	26%	14%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

Target Kinerja Program di Renstra Mengalami Perubahan Seperti diatas dikarenakan :

1. Penghitungan target untuk realisasi tahun 2018-2023, masih menggunakan target yang di tetapkan diawal RPJMD 2018-2023 sebanyak 4310 pelaku usaha yang memiliki izin;
2. untuk kondisi awal yang akan digunakan, penghitungan dasar Tahun 2024 menggunakan data terbaru realisasi investasi yang ada sistem OSS RBA Tahun 2021 sebanyak 21.830 pelaku usaha yang sudah memiliki izin (NIB) dan realisasi jumlah pelaku usaha yang tertib/patuh LKPM sebanyak 3115 di Tahun 2021 :

jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh LKPM

x 100%

= 3115 x 100% = 14%

21830
3. Pelaku usaha yang tertib lapor LKPM menggunakan data terupdate Tahun 2021, untuk rumusan tidak ada perubahan.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran secara online di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum dapat secara langsung mengusulkan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Forum Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya pada usulan Musrenbang kabupaten/kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan misi Presiden Terpilih Periode 2020-2024 yang menetapkan tema pembangunan tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJPN Tahun 2005-2025 yang merupakan Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia Emas. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun 2025 yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Penyusunan Renja DPMPTSP menyesuaikan prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan RPD dan Rancangan RKPD Tahun 2024-2026.

Tema pembangunan daerah pada RKPD Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah “Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata”, dengan sasaran

pembangunan tahun 2025 yaitu mengupayakan pencapaian target-target Pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui :

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- d. Penguatan daya saing usaha;
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dan
- g. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi melaksanakan fungsi yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki peranan dalam percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui pengupayaan dalam meningkatkan nilai investasi daerah yang berimplikasi pada terciptanya lapangan usaha baru untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan serta terhapusnya kemiskinan ekstrim dapat tercapai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan rencana kerja :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi;

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP**

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat;
- Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan multi prima kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah, dan akuntabel.

Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

3. Peningkatan Nilai Investasi Daerah.
- Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi
- Indikator : **Peningkatan Nilai Investasi.**

b. Sasaran

Sasaran rencana kerja :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.
- Indikator : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP.**
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan responsive melalui PTSP yang terintegrasi.
- Indikator : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**
3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.
- Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pada pelayanan prima baik PMA/ PMDN guna peningkatan investasi.
- Indikator : **Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.**

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
				2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,10
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,10
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-	Peningkatan Nilai Investasi	7%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun untuk menjadi acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi

pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

Dalam rancangan akhir penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dari Belanja Langsung Urusan dengan total anggaran sebesar Rp 35.520.543.410,- (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi serta sosialisasi potensi investasi, meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Terdapat 2 (dua) kegiatan pada program ini, yaitu :

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu :

- Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan pada ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.**

Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan dari Kegiatan ini, yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dimana tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan dari Kegiatan di atas yaitu :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan arah pengembangan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan pada kegiatan ini, yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Bekasi. Tujuan program ini yaitu menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi di Kota Bekasi.

Kegiatan dalam program ini yaitu :

- **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pada kegiatan ini, yaitu :

1. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
2. Pengawasan Penanaman Modal.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Program Nasional, Program Kota dan Kegiatan

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten / Kota.
		2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
		4. Program Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
		5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Awal)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100% 100%	28.463.540.340	PAD		100%	30.152.061.020
2	18	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	165.000.000	PAD		100%	15.000.000
2	18	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	150.000.000	PAD		-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	15.000.000	PAD		8 Laporan	15.000.000
2	18	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.049.337.000	PAD		100%	15.071.309.000
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	5208 Orang /Bulan	24.034.337.000	PAD		1.846 Orang /Bulan	15.056.309.000
2	18	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	19 laporan	15.000.000	PAD		19 laporan	15.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	328.750.000	PAD		100%	450.000.000
2	18	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Bekasi	1 paket	278.750.000	PAD		250 Stel	400.000.000
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	50.000.000	PAD		5 Orang	50.000.000
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	1.241.593.000	PAD		100%	1.370.000.000
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD		1 Paket	20.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	21.533.000	PAD		0 Paket	-
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	480.000.000	PAD		1 Paket	600.000.000
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	200.000.000	PAD		1 Paket	250.000.000
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD		12 Dokumen	50.000.000
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD		12 Laporan	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD		24 Laporan	200.000.000
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.060.000	PAD		600 Dokumen	150.000.000
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi	100%	265.447.000	PAD		100%	500.000.000
2	18	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	265.447.000	PAD		15 Unit	200.000.000
2	18	1	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		10 Unit	300.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	1.771.753.340	PAD		100%	11.895.752.020
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	736.000.000	PAD		12 Laporan	747.000.000
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.035.753.340	PAD		12 Laporan	11.148.752.020
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi	100%	641.660.000	PAD		100%	850.000.000
2	18	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD		7 Unit	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD		7 Unit	100.000.000
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		90 Unit	100.000.000	PAD		110 Unit	200.000.000
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	215.000.000	PAD		1 Unit	300.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Baru	Kota Bekasi	4%	255.000.000	PAD		4%	250.000.000
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	55.000.000	PAD		-	-
2	18	2	03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.000.000	PAD		-	-
2	18	2		Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD		100%	250.000.000
2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	200.000.000	PAD		1 Dokumen	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	PAD		14.000 Pelaku Usaha	500.000.000
2	18	03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	500.000.000
2	18	03	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD		3 Dokumen	500.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD		100%	6.350.000.000
2	18	4		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD		100%	6.350.000.000
2	18	4	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	365.000.000	PAD		-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	PAD		13.000 Pelaku Usaha	6.000.000.000
2	18	4	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	PAD		600 Kegiatan Usaha	350.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi	15%	475.000.000	PAD		15,5%	500.000.000
2	18	05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi	100%	475.000.000	PAD		100%	500.000.000
2	18	05	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku Usaha	200.000.000	PAD		600 Pelaku Usaha	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	275.000.000	PAD		500 Kegiatan Usaha	250.000.000
2	18	6		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Kota Bekasi	4	525.319.070	PAD		4	700.000.000
2	18	6		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	700.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	6	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD		12 Dokumen	700.000.000
					BLPU			28.463.540.340				30.152.061.020
					BLU			7.057.003.070				8.300.000.000
					Total Anggaran			35.520.543.410				38.452.061.020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DPMPTSP KOTA BEKASI

Perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BKPM Tahun 2020-2024, RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dengan mengacu hal-hal tersebut di DPMPTSP Kota Bekasi telah merumuskan 6 (enam) Program, 13 (tigabelas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Bekasi yaitu meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

Dalam mendukung arah kebijakan yang telah ditentukan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi, program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan, DPMPTSP tergabung pada Arah Kebijakan 5 yaitu peningkatan kekuatan dan kemandirian perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Adapun Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100% 100% 100%	28.463.540.340	PAD	
2	18	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	165.000.000	PAD	
2	18	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	150.000.000	PAD	
2	18	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	15.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	24.034.337.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	5208 Orang /Bulan	24.034.337.000	PAD	
2	18	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	19 laporan	15.000.000	PAD	
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	328.750.000	PAD	
2	18	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Bekasi	1 paket	278.750.000	PAD	
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	50.000.000	PAD	
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	1.241.593.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	21.533.000	PAD	
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	480.000.000	PAD	
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	200.000.000	PAD	
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD	
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD	
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD	
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.060.000	PAD	
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi	100%	265.447.000	PAD	
2	18	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	20 Unit	265.447.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	1.771.753.340	PAD	
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	736.000.000	PAD	
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1.035.753.340	PAD	
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi	100%	641.660.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD	
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD	
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	90 Unit	100.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	215.000.000	PAD	
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Baru	Kota Bekasi	4%	255.000.000	PAD	
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	55.000.000	PAD	
2	18	2	03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.000.000	PAD	
2	18	2		Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD	
2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	200.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	PAD	
2	18	03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD	
2	18	03	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD	
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD	
2	18	4		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	5.451.684.000	PAD	
2	18	4	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	365.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	4	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	PAD	
2	18	4	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	PAD	
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	Kota Bekasi	15%	475.000.000	PAD	
2	18	05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi	100%	475.000.000	PAD	
2	18	05	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku Usaha	200.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	275.000.000	PAD	
2	18	6		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Kota Bekasi	4	525.319.070	PAD	
2	18	6		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD	
2	18	6	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD	
					BLPU			28.463.540.340		
					BLU			7.057.003.070		
					Total Anggaran			35.520.543.410		

B A B V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 ini, dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2025 setelah adanya anggaran kegiatan. Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kota Bekasi disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bekasi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini :

1. Seluruh Bidang, Sekretariat dan Tim Teknis, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, secara bersinergi dan terintegrasi;
2. Tim Penyusun Perencanaan Kinerja Investasi di DPMPTSP Kota Bekasi menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang berdasarkan kepada laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi bahan dasar penyusunan Renja Dinas Tahun 2025 dan 2026.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang

dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi, oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
5. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas.
6. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
7. Renja DPMPTSP Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja DPMPT SP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan semangat bersama dapat merealisasikannya demi mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kota Bekasi sebagai kota tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.



Dr. DICKY IRAWAN, S.T M.T
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720413 199901 1 002